

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan dan kemakmuran Ekonomi yang stabil merupakan cita cita dari seluruh masyarakat dan pemerintah yang menempati suatu negara atau wilayah tertentu. Untuk mewujudkan hal itu maka masyarakat dan pemerintah dari negara yang menempati memerlukan cara untuk merealisasikan cita cita negara tersebut. Proses guna merealisasikan ekonomi yang makmur dan sejahtera merupakan pengertian dari pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang lebih luas lagi yaitu suatu rangkaian langkah-langkah atau proses guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara, gambaran pembangunan tertentu dari yang mulanya primitif menuju modern, penambahan wawasan dan keterampilan pada masyarakatnya serta mengubah yang mulanya sebagian besar bermata pencaharian agraris menuju industrialiasi yang *goals*-nya adalah pertumbuhan ekonomi.<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi sendiri menjadi salah satu indeks makro dalam menilai keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yang menyediakan berbagai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah. Terpenuhinya Sumber daya manusia, budaya, keilmuan dan teknologi, serta modal merupakan faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan ekonomi termasuk salah satu hal penting yang mendorong tercapainya keberhasilan pembangunan nasional, dorongan yang dimaksud berupa percepatan pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem kerakyatan. Alasan mengapa hal itu sangat penting sebab didasarkan pada persoalan dan tantangan yang diatasi, serta arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi, baik pembangunan jangka pendek

---

<sup>2</sup> Muhammad Hasan dan Muhamad Azis, *Pembangunan Ekonomi Dan Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Lokal*, (Makassar: CV Nur Lina, 2018), Hal 2-3

maupun jangka menengah.<sup>3</sup> Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan penjelasan yang lebih lengkap dari pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran pembangunan berdasarkan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah direalisasikan dengan tujuan tercapainya sasaran pembangunan nasional serta untuk meningkatkan daya guna dan daya hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata.<sup>4</sup> Kabupaten/kota merupakan daerah otonom yang berfungsi melaksanakan, sementara itu yang menjadi koordinator dan memiliki wewenang serta tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat menggunakan prinsip transparan/keterbukaan, keikutsertaan melibatkan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat merupakan fungsi dari pemerintah provinsi.<sup>5</sup>

Otonomi daerah merupakan wewenang atau kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang undang yang berlaku. Tujuan utama dari otonomi daerah atau desentralisasi adalah mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat khususnya pembangunan yang ada di daerah diharapkan berkembang sesuai perkembangan di pusat. Otonomi daerah juga mendekatkan jarak pengambilan keputusan ke masyarakat, merancang strategi, dan proses pembangunan yang diharapkan lebih bijak dalam menerima berita yang berkembang. Pelaksanaan otonomi daerah memiliki landasan hukum yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 yang diharapkan berdampak positif untuk kinerja ekonomi daerah dalam mengelola potensi yang dimiliki daerah seperti SDA, SDM, pengelolaan dana, daya guna dan daya hasil sehingga memperkecil angka

---

<sup>3</sup> Kuncoro Thesaurianto, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2007), Hal 49

<sup>4</sup> Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Bappenas, *Musrenbangda Rpjm Provinsi Jawa Barat 2008-2013*, [https:// www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/berita/musrenbangda-rpjm-provinsi-jawa-barat-2008-2013/](https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/berita/musrenbangda-rpjm-provinsi-jawa-barat-2008-2013/), (diakses tanggal 21 juni 2021), pukul 11:32

<sup>5</sup> Ridwan dan Nashar, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hal 86

ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat, dalam masalah pembiayaan maupun mengelola dana yang dimiliki daerah.<sup>6</sup>

Landasan utama pelaksanaan otonomi daerah termuat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yang memuat pemerintah daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 yang memuat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pelaksanaan tata kelola yang optimal oleh pemangku kewenangan daerah dapat menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan investasi yang mendorong pemerintah daerah lebih mandiri dari campur tangan pemerintah pusat dalam mengelola potensi daerahnya terutama di bidang keuangan dengan melaksanakan prinsip transparan, jujur, efisien, efektif, demokratis dan akuntabel.<sup>7</sup> Salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yaitu pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip *Value For Money* seperti efektif, terbuka, transparan, efisien, bersaing, akuntabel dan adil. Sumber daya manusia dan sumber daya alam yang optimal akan menggambarkan seberapa baik tingkat pengelolaan keuangan daerah.<sup>8</sup> Tolak ukur keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat di lihat dari besar kecilnya pendapatan asli daerah yang diterima. Berjalannya prinsip akuntabilitas yang ada pada pemerintah daerah dapat dilihat dari analisis kinerja keuangan yang hasil akhirnya akan menentukan apakah otonomi daerah telah berjalan sesuai manfaatnya pada daerah tersebut. Serta penggunaan tata kelola yang baik bagi pihak-pihak pelaksana yang di beri kewenangan sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan, terutama keputusan investasi. Atas dasar persoalan tersebut maka pemerintah mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 yang memuat pemerintah daerah serta UU No 25 tahun 1999 mengenai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal 2-3

<sup>7</sup> Y Rahmat Akbar dan Maraini, "The Role Of Good Governance In Economic Growth: Mediated By Regional Financial Performance And Capital Expenditure Allocation", *Ilomata International Journal of Tax & Accounting (IJTC)*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2021, 194-208, (diakses tanggal 22 juni 2021), pukul 08:14, Hal 205

<sup>8</sup> Putu Adi Erawan Dkk, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Peranan *Value For Money* Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng Vol. 8 No. 3, Desember 2018 ISSN: 2599-2651, 2018, Hal 189

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.<sup>9</sup>

Kinerja Keuangan pemerintah daerah merupakan pencapaian hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran daerah dan belanja modal dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan pada satu periode anggaran kerja. Bentuk pengukuran kinerja berupa rasio-rasio keuangan yang dibentuk dari unsur-unsur laporan pertanggung jawaban kepala daerah berupa perhitungan anggaran. Dalam organisasi pemerintahan untuk mengukur kinerja keuangan terdapat beberapa ukuran kinerja yaitu kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efisiensi PAD, keserasian keuangan, efektivitas PAD, dan derajat desentralisasi.<sup>10</sup> Oleh sebab itu maka terlihat adanya hubungan antara, pertumbuhan ekonomi daerah dengan kinerja keuangan.

Alasan peneliti memilih kota di Provinsi Jawa Timur adalah karena kota-kota di Jawa Timur memiliki Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai tahun 2019, kondisi ini berubah menurun pada tahun 2020-2021 disebabkan pandemi covid-19. PDRB pada masing masing kota setiap tahunnya meningkat salah satunya karena pesatnya perkembangan objek wisata pada masing-masing daerah. Tetapi pada kenyataannya angka pada PRDB masing masing kota masih terdapat ketimpangan dan ketergantungan satu sama lain, salah satu contohnya adalah tingginya PDRB kota Blitar yang tinggi nilainya di banding kota surabaya padahal terdapat pelabuhan terpadat kedua di indonesia yang terletak di kota surabaya yaitu tanjung perak yang seharusnya mengakibatkan tingginya PAD disana, berbeda dengan kota blitar yang tidak memiliki pelabuhan tetapi PDRB lebih tinggi (Grafik 1.1). hal inilah yang menyebabkan peneliti ingin menjadikan kota di Jawa Timur sebagai lokasi objek penelitian.

---

<sup>9</sup> Bappenas, <https://www.bappenas.go.id/id/data-dan-informasi-utama/produk-hukum-peraturan-perundangan/undang-undang/uu-no-22-tahun-1999-tentang-pemerintahan-daerah/>, (diakses tanggal 22 juni 2021), pukul 19:57

<sup>10</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2001), Hal. 127

BPS Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dan 2021 sebagai yang terburuk selama kurun waktu lima tahun belakangan. Hal ini diakibatkan, karena ekonomi Jawa Timur berkontraksi 5,9% dibanding tahun sebelumnya di 2019. Masalah yang dominan sebab lambatnya tingkat pertumbuhan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 dan 2021 ialah terpuruknya lapangan pengelolaan industri akibat pandemi covid -19.

**Tabel 1.1**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2019-2021 (persen)**

<b>Lapangan Usaha</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,18	0,94	-1,73
Pertambangan dan Penggalian	1,47	-4,18	-7,76
Industri Pengelolaan	6,85	-2,06	0,13
Pengadaan Listrik dan Gas	1,38	-2,39	0,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,71	5,03	1
Konstruksi	5,89	-3,28	-0,97
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,96	-5,74	4,06
Transportasi dan Pergudangan	3,77	-1,16	-1,11
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,55	-8,87	-0,38
Informasi dan Komunikasi	7,36	9,83	3,17
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,80	0,18	-1,94
Real Estat	6,03	3,95	-1,09
Jasa Perusahaan	3,72	-0,39	-1,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,72	-0,39	-3,24
Jasa Pendidikan/Education	7,27	3,96	-2,11

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	8,70	1,31
Jasa Lainnya	6,26	-1,80	2,38
Produk Domestik Regional Bruto	5,52	-2,39	3,57

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>11</sup>

Berdasarkan tabel 1.1 data laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan 2010 diatas Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa persentase pada tahun 2021 dominan mengalami penurunan dari 17 sektor yang ada hanya 7 sektor yang mengalami kenaikan yakni sektor industri pengelolaan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, sektor transportasi dan perdagangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, serta sektor jasa lainnya.

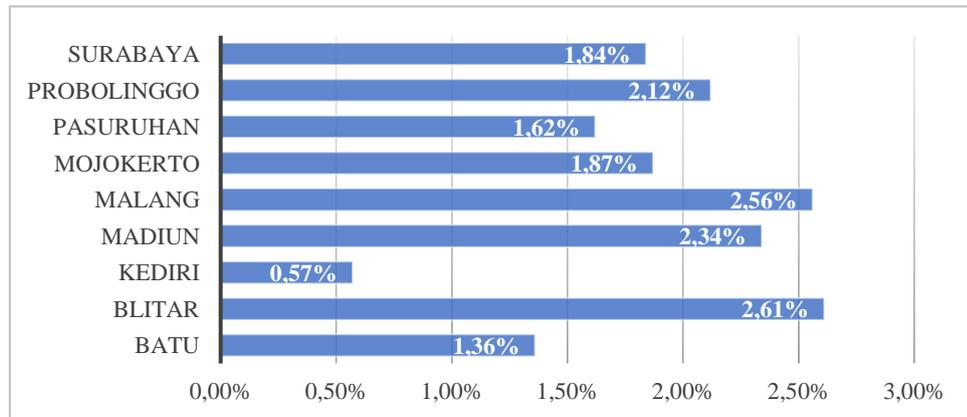
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang berasal dari seluruh hasil sektor perekonomian suatu daerah. Menghitung produk domestik regional bruto bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah (perencanaan), mengevaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian daerah yang efektif dan efisien sesuai rencana yang telah di buat oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain semakin tinggi nilai PDRB maka semakin baik pula pengelolaan atau kinerja pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, begitu juga sebaliknya. PDRB meliputi : upah dan gaji, bunga, sewa tanah, pajak tidak langsung, penyusutan dan keuntungan.<sup>12</sup> Laju pertumbuhan (PDRB) Provinsi Jawa Timur periode 2020 berada pada angka -2,39% akibat kontraksi yang dipicu serangan pandemi covid-19 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 3,57%.

---

<sup>11</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2021*, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses pada Sabtu 7 agustus 2021), Pukul 17.11 WIB

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik, *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB/Kota*, (Jakarta: BPS-Statistik Indonesia, 2008), Hal 17

**Grafik 1.1**  
**Pertumbuhan PDRB Perkotaan di Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2021 Dalam Bentuk Persen**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>13</sup>

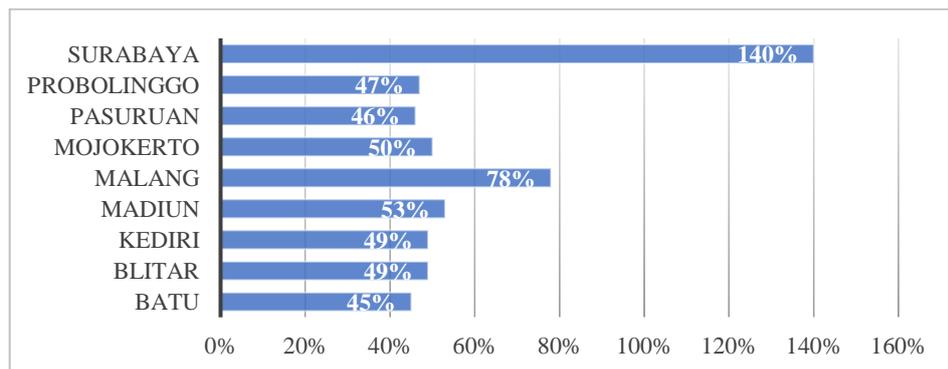
Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1.1 diatas maka dapat diketahui nilai Pertumbuhan PDRB selama 3 tahun terakhir periode 2019-2021 perkotaan di Jawa Timur, dapat terlihat bahwa nilai Pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Kota Blitar sedangkan nilai pertumbuhan terendah dimiliki oleh Kota Kediri. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Kediri pada tahun 2021 mengalami kenaikan setelah mengalami kontraksi yang cukup tajam. Penurunan yang tajam tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi yang secara umum mengalami dampak pandemi covid-19 sepanjang tahun 2020. Nilai PDRB Kota Kediri 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 86,48 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 84,37 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi positif sebesar 2,5 persen, lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai minus 6,25 persen.

PDRB sangat penting untuk menilai tingkat kinerja suatu daerah, jika nilai PDRB tinggi maka kinerja daerah dapat dikatakan baik atau sukses mengelola daerahnya tetapi sebaliknya jika nilai PDRB rendah maka kinerja daerahnya pastilah mengalami masalah-masalah yang gagal diatasi bisa dari

<sup>13</sup> BPS Jawa Timur, (diakses pada Sabtu 7 agustus 2021), Pukul 17.11 WIB

faktor internal maupun eksternal kewenangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syamsudin dkk (2015)<sup>14</sup> dan Rita Irviani dkk (2017)<sup>15</sup> menunjukkan bahwa PDRB di pengaruhi salah satunya oleh rasio kemandirian keuangan. Rasio kemandirian keuangan mencerminkan tinggi rendahnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan di daerah aslinya. Semakin tinggi tingkat keikutsertaan masyarakat terhadap PAD, dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan tujuan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula.<sup>16</sup>

**Grafik 1.2**  
**Kemandirian Keuangan Perkotaan di Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2014-2021 Dalam Bentuk Persen**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>17</sup>

Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1.2 diatas maka dapat diketahui nilai rasio kemandirian keuangan selama 3 tahun terakhir periode 2019-2021 perkotaan di Jawa Timur, dapat terlihat bahwa nilai kemandirian keuangan tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sedangkan nilai

<sup>14</sup> Syamsudin Dkk, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi , Pengangguran dan Kemiskinan , Vol. 17 No. 1, Juni 2015, Hal 23

<sup>15</sup> Rita Irviani,Citrawati Jatiningrum dan Kasmi, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, Pengaruh Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten Atau Kota Provinsi Lampung, Vol. 11 No. 1 Januari 2017, Hal 10

<sup>16</sup> Joko Widodo, *Good Governance*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), Hal. 262

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2021*, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses pada Jumat 10 Juni 2022), Pukul 09.11 WIB

kemandirian keuangan terendah dimiliki oleh Kota Batu. Sesuai dengan syarat pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah harus senantiasa setiap tahun meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Realisasi anggaran pendapatan daerah di Kota Batu tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Sama seperti tahun sebelumnya, RAPBD Kota Batu masih mengandalkan sumber bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari propinsi.

Pada tahun 2021, anggaran Kota Batu mengalami defisit sebesar 88,59 milyar rupiah. Anggaran belanja daerah sebesar 1.087,36 milyar rupiah melebihi anggaran pendapatan daerah yang besarnya 998,77 milyar rupiah. Sementara itu, realisasi PAD dari sektor pajak sebagian besar berasal dari sektor Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yaitu hampir sebesar 34 persen (39 Milyar rupiah). Dari sektor retribusi, PAD Kota Batu sebesar 5 Milyar dimana 61 persen berasal dari retribusi jasa umum. Dengan demikian pentingnya rasio kemandirian keuangan sebagai penggambaran ketergantungan keuangan terhadap sumber dana eksternal dari pemerintah pusat dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti ketergantungan keuangan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya.

**Tabel 1.2**  
**Perbedaan Hasil Penelitian Terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Variabel X : Independen Y: Dependen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Syamsudin, Bayu Tri Cahya, dan Syahrina Nurmala Dewi (2015) <sup>18</sup>	Kemandirian Keuangan( $X_1$ ), Efektivitas PAD( $X_2$ ), Efisiensi PAD( $X_3$ ) Pertumbuhan Ekonomi,	a. Kemandirian Keuangan Berpengaruh Signifikan terhadap PE b. Efektivitas PAD dan Efisiensi PAD tidak	Kemandirian keuangan dalam penelitian ini bernilai signifikan dikarenakan besarnya PAD yang diperoleh dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan

<sup>18</sup> Syamsudin Dkk, Pengaruh Kinerja..., Hal 23

	Pengangguran, Kemiskinan (Y)	<p>berpengaruh signifikan terhadap PE</p> <p>c. Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD secara simultan berpengaruh terhadap PE</p> <p>d. Kemandirian keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD berpengaruh langsung terhadap pengangguran dan kemiskinan</p> <p>e. Kemandirian keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD berpengaruh tidak langsung PE terhadap pengangguran dan kemiskinan</p>	<p>daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah serta lebih besar dari pinjaman dan bantuan pusat, maka dari itu semakin mandiri daerah tersebut. Semakin mandiri daerah tersebut, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut dapat mengalami peningkatan.</p>
Fildza Amalina Qisthina, Moh. Khusaini dan Setyo Tri Wahyudi (2019) <sup>19</sup>	Kemandirian Keuangan ( $X_1$ ) Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ ) dan Indeks Pembangunan Manusia ( $Y_2$ )	<p>a. Kemandirian Keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap PE</p> <p>b. Kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap IPM</p>	<p>Kemandirian dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada rasio kemandirian keuangan daerah sehingga pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh masyarakat di daerah tersebut. Hal tersebut akan berdampak pada kesenjangan PE di berbagai kabupaten/kota daerah. Berdasarkan data tersebut, dapat</p>

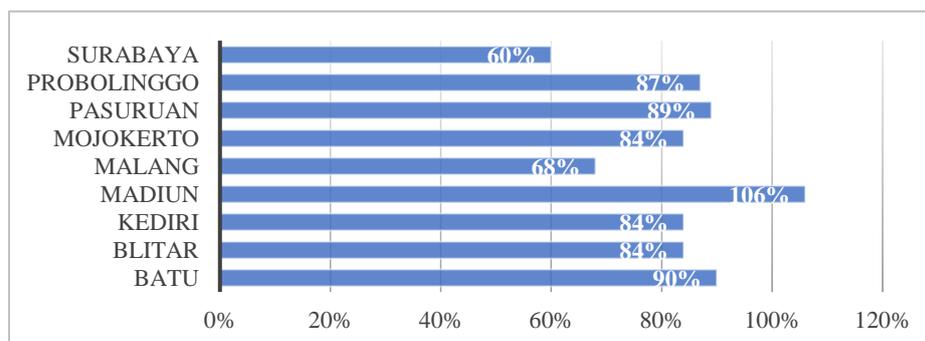
<sup>19</sup> Fildza Amalina Qisthina, Moh. Khusaini dan Setyo Tri Wahyudi, *Jurnal Wacana, Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development Index (Case Study : SWP Gerbangkertasusila Plus)*, Vol.22 No.1, ISSN : 1411-0199, E-ISSN : 2338-1884, Oktober 2019, Hal. 49-50

			disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah dan masih bergantung pada pemerintah pusat.
--	--	--	---

Sumber : Data diolah 2022

Pemerintah daerah dapat meningkatkan rasio kemandirian keuangan masing-masing dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, dengan demikian pemerintah daerah kembali dihadapkan dengan persoalan ketergantungan keuangan, apabila pemerintah daerah telah berhasil memperber nilai kemandirian keuangan maka nilai rasio ketergantungan keuangan akan dapat di tekan dengan sendirinya. Rasio ketergantungan keuangan menggambarkan perbandingan antara dana bantuan dari pemerintah dengan total pendapatan asli daerah. semakin tinggi angka perbandingan antara dana bantuan dengan total pendapatan daerah maka semakin tinggi pula nilai ketergantungan keuangan pengelolaan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.<sup>20</sup>

**Grafik 1.3**  
**Ketergantungan Keuangan Perkotaan di Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2021 Dalam Bentuk Persen**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>21</sup>

Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1.3 diatas maka dapat diketahui nilai rasio ketergantungan keuangan selama 3 tahun terakhir periode 2019-2022 perkotaan di Jawa Timur, dapat terlihat bahwa nilai rasio

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hal. 235

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2021*, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses pada Jumat 10 Juni 2022), Pukul 10.17 WIB

ketergantungan keuangan terendah dimiliki oleh Kota Surabaya sedangkan nilai rasio ketergantungan keuangan tertinggi dimiliki oleh Kota Madiun. Penyebabnya masih sama yaitu karena terkontraksi akibat pandemi covid-19 sehingga pemerintah Kota Madiun menerima banyak transfer dari pemerintah pusat yang mengakibatkan naiknya angka rata-rata nilai ketergantungan di Kota Madiun. Rasio ketergantungan keuangan juga sangat bermanfaat untuk melihat apakah dari tahun ketahun kinerja pemerintah khususnya daerah telah dengan baik dan efisien dalam mengelola keuangan daerah masing-masing atau tidak.

**Tabel 1.3**  
**Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu Rasio Ketergantungan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Variabel X : Independen Y: Dependen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Rita Irviani, Citrawati Jatiningrum dan Kasmi (2017) <sup>22</sup>	Pendapatan Daerah [Pendapatan Asli Daerah(X <sub>1</sub> ), Pajak Daerah(X <sub>2</sub> ), Retribusi Daerah(X <sub>3</sub> ), Dana Perimbangan(X <sub>4</sub> ), Dana Bagi Hasil (X <sub>5</sub> ), Dana Alokasi Khusus(X <sub>6</sub> ), Dana Alokasi Umum (X <sub>7</sub> )] Kinerja Keuangan {Derajat Desentralisasi(X <sub>8</sub> ), Ketergantungan Keuangan(X <sub>9</sub> ), Kemandirian Keuangan(X <sub>10</sub> ) Pertumbuhan Ekonomi(Y <sub>1</sub> ) dan Kesejahteraan Ekonomi(Y <sub>2</sub> )	a. Seluruh Variabel bebas secara Parsial Berpengaruh signifikan terhadap PE b. Seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PE c. Seluruh Variabel bebas kecuali dana perimbangan (X <sub>4</sub> ) dan dana bagi hasil (X <sub>5</sub> ) serta Kinerja Keuangan secara Parsial Berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Ekonomi (IPM) d. Seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap	Karena angka ketergantungan keuangan daerah kecil maka pemerintah daerah dianggap berhasil dalam mengelola keuangan daerah dalam tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan baik, maka alokasi belanja rutin dapat dipenuhi dan dapat membelanjakannya untuk investasi daerah yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

<sup>22</sup> Rita Irviani, Citrawati Jatiningrum dan Kasmi, "Pendapatan Daerah...", Hal. 10

		Kesejahteraan Ekonomi (IPM)	
Oktarini Khamilah Siregar dan Fitri Yani Panggabean (2019) <sup>23</sup>	Kemandirian Keuangan (X1), Ketergantungan Keuangan (X2), Efektivitas PAD (X3), Pendapatan Daerah (X4), Efektivitas Pajak Daerah (X5) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	a. Kemandirian keuangan berpengaruh signifikan terhadap PE b. Ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, pendapatan daerah, efektivitas pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PE c. Seluruh variabel dependen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PE	Ketergantungan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap PE sebab Rata-rata nilai rasio ketergantungan keuangan kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat masih tinggi sehingga memicu tingginya angka ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat namun tingginya kontribusi dana perimbangan tidak mampu merubah struktur belanja modal.

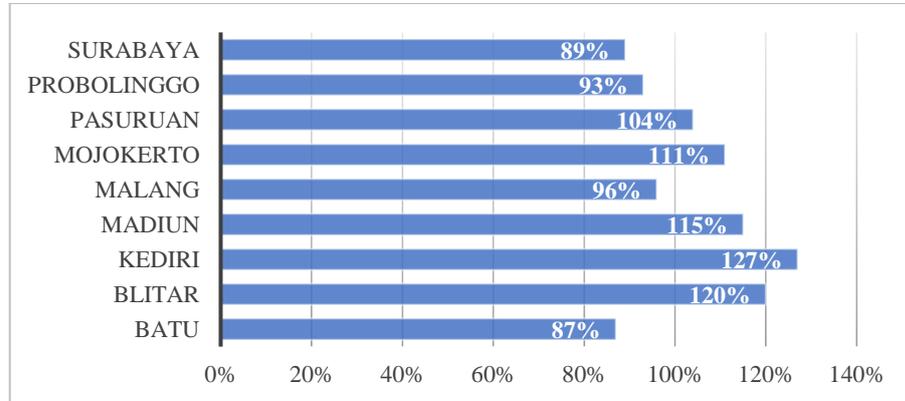
Sumber : Data Diolah 2022

Nilai ketergantungan keuangan dari dana pemerintah pusat dapat ditekan dengan meningkatkan nilai kemandirian keuangan dan mengelola SDM dan SDA daerah secara efektif. Dengan demikian pemerintah daerah kembali dihadapkan dengan persoalan rasio efektivitas PAD, apabila pemerintah daerah telah berhasil memperbaiki nilai efektivitas PAD maka nilai rasio ketergantungan keuangan akan dapat ditekan dengan sendirinya. Rasio efektivitas PAD mencerminkan perbandingan antara tingkat kemampuan pemerintah daerah terhadap terealisasi PAD dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Dimana semakin tinggi nilai efektivitas PAD, maka semakin efektif kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, begitu pula sebaliknya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Oktarini Khamilah Siregar dan Fitri Yani Panggabean, *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, Analisis Kinerja Keuangan Daerah Berbasis Rasio dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatra Utara, Vol.11 No.2 Januari 2021, ISSN. 2087-4669. Hal. 33

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan daerah*, (Yogyakarta : Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), Hal 234

**Grafik 1.4**  
**Efektivitas PAD Perkotaan di Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2021 Dalam Bentuk Persen**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>25</sup>

Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1.4 diatas maka dapat diketahui nilai rasio efektivitas PAD selama 3 tahun terakhir periode 2019-2021 perkotaan di Jawa Timur, dapat terlihat bahwa nilai efektivitas PAD tertinggi dimiliki oleh Kota Kediri sedangkan nilai efektivitas PAD terendah dimiliki oleh Kota Batu. Diakibatkan realisasi PAD yang lebih rendah di banding target PAD ditambah adanya kontraksi akibat pandemi covid-19 sehingga keefektivitasan pengelolaan keuangan menjadi terhambat dan dalam laporannya menjadi lebih rendah dari rata-rata tahun sebelumnya. efektivitas PAD berguna untuk melihat apakah dari tahun ketahun kinerja pemerintah khususnya daerah telah optimal dalam mengelola keuangan daerah dengan cara-cara yang efektif sehingga mengurangi dana, waktu, serta tenaga yang dikeluarkan.

**Tabel 1.4**  
**Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu Rasio Efektivitas PAD**  
**Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Peneliti (Tahun)	Variabel X : Independen Y: Dependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Y Rahmat Akbar dan	Kemandirian Keuangan (X1)	a. Kemandirian keuangan,	Efektivitas PAD memiliki

<sup>25</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2021*, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses pada Jumat 10 Juni 2022), Pukul 11.06 WIB

Maraini (2021) <sup>26</sup>	Efektivitas PAD (X2) Kesesuaian (X3) Derajat Desentralisasi (X4) Ketergantungan Keuangan (X5) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Kesesuaian, Derajat Desentralisasi, Ketergantungan Keuangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PE b. Efektivitas PAD secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap PE c. Kemandirian keuangan, Efektivitas PAD, Kesesuaian, Derajat Desentralisasi, Ketergantungan secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PE	pengaruh positif dan signifikan terhadap PE sebab semakin efektif suatu daerah, maka PE akan semakin membaik. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa efektifitas PAD daerah sebagai prediktor dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. efektifitas PAD sendiri merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD.
Suci Nurulita, Hamdani Arifulyah dan Yefni (2018) <sup>27</sup>	Kemandirian keuangan (X1) Efektivitas PAD (X2) Efisiensi PAD (X3), Pertumbuhan Ekonomi (Y1), Tingkat Pengangguran Terbuka (Y2)	a. Secara langsung, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kemandirian keuangan dan efektivitas PAD terhadap PE Provinsi Riau. Sedangkan untuk efisiensi, terdapat pengaruh yang signifikan antararasio efisiensi terhadap PE di Provinsi Riau. b. Secara langsung, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja keuangan daerah dan PE terhadap tingkat	Efektivitas PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PE sebab perekonomian daerah akan meningkat jika terjadi peningkatan pada efektivitas PAD pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas PAD pemerintah daerah yang tinggi

<sup>26</sup> Y Rahmat Akbar dan Maraini, "The Role...", Hal 205

<sup>27</sup> Suci Nurulita, Hamdani Arifulyah dan Yefni, *Jurnal Benefita*, Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Riau, Vol.3 No.3 Oktober 2018 (336-356), Hal. 343-351

		<p>pengangguran di Provinsi Riau.</p> <p>c. Secara tidak langsung, tidak berpengaruh signifikan antara rasio kemandirian keuangan dan efisiensi PAD terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Riau melalui variabel PE Provinsi Riau. Sedangkan untuk efektivitas, terdapat pengaruh yang signifikan antara efektivitas PAD terhadap tingkat pengangguran melalui PE di Provinsi Riau.</p>	<p>menunjukkan realisasi PAD yang tinggi sehingga diharapkan akan mendorong kegiatan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan PE daerah tersebut.</p>
--	--	--	--

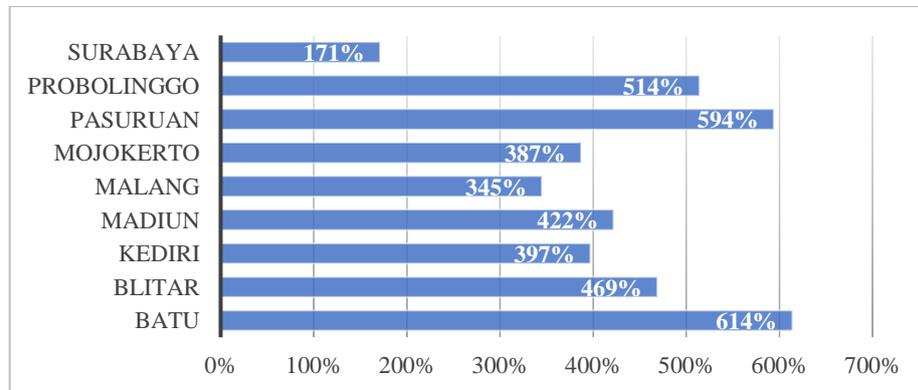
*Sumber : Data diolah 2022*

Namun, realisasi PAD yang tinggi tidak selalu diikuti dengan kegiatan pembangunan yang tinggi pula, sehingga tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Rasio Efektivitas dapat dioptimalkan dengan menggunakan biaya yang tepat dalam mencapai pembangunan daerah, sehingga kesejahteraan meningkat dan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga ikut meningkat dengan demikian pemerintah daerah kembali dihadapkan dengan persoalan Rasio Efisiensi PAD, apabila pemerintah daerah dapat memperbesar nilai Efektivitas maka nilai Efisiensi PAD dapat ditekan karena besarnya PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efisiensi PAD mencerminkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau pemungutan PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini berarti semakin tinggi angka Efisiensi PAD maka, pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dikatakan tidak optimal begitu juga sebaliknya apabila nilai Efisiensi PAD rendah maka dapat dikatakan optimalnya kinerja keuangan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hal. 234

**Grafik 1.5**  
**Efisiensi PAD Perkotaan di Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2021 Dalam Bentuk Persen**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>29</sup>

Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1.5 diatas maka dapat diketahui nilai efisiensi PAD selama 3 tahun terakhir periode 2019-2021 perkotaan di Jawa Timur, dapat terlihat bahwa efisiensi tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sedangkan nilai efisiensi PAD terendah dimiliki oleh Kota Batu. Hal ini dapat terjadi karena total realisasi belanja daerah kota surabaya relatif kecil sehingga angka efisiensi dapat ditekan. Sedangkan Kota batu memiliki rasio efisiensi PAD tinggi hal ini mengindikasikan bahwa total realisasi belanja daerah Kota batu tinggi dengan PAD yang kurang. Rasio efisiensi PAD berguna untuk melihat apakah dari tahun ketahun kinerja pemerintah khususnya daerah telah optimal dalam mengelola keuangan daerah dengan cara-cara yang efisien sehingga mengurangi dana, waktu, serta tenaga yang dikeluarkan.

**Tabel 1.5**  
**Perbedaan Hasil Penelitian Terdahulu Rasio Efisiensi PAD Terhadap**  
**Pertumbuhan Ekonomi**

Peneliti (Tahun)	Variabel X : Independen Y: Dependen	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Muhammad Azhari,	Kemandirian Keuangan (X1)	a. Kemandirian keuangan,	Efisien PAD berpengaruh

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2021*, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses pada Jumat 10 Juni 2022), Pukul 13.32 WIB

Andria Zulfa dan Murtala (2020) <sup>30</sup>	Efektivitas PAD (X2) Efisiensi PAD (X3) Pertumbuhan Pendapatan (X4) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Efektivitas PAD, Efisiensi PAD, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap PE b. Pertumbuhan Pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PE c. Kemandirian Keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan PP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PE	negatif dan signifikan terhadap PE karena semakin kecil nilai efisiensi maka kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya akan berdampak baik terhadap PE. Selain itu, hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa efisiensi PAD menjadi prediktor dalam meningkatkan PE.
Istia Nur Pradiatmi dan Hardiyanto Wibowo (2015) <sup>31</sup>	Derajat Desentralisasi (X1), Ketergantungan Keuangan (X2), Kemandirian Keuangan (X3), Derajat Kontribusi BUMD (X4), Efisiensi PAD (X5), Kecerahan Belanja (X6), Belanja Modal (X7) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	a. Derajat Desentralisasi, Ketergantungan keuangan, Kemandirian keuangan secara parsial berpengaruh terhadap PE b. Derajat Kontribusi BUMD, Efisiensi PAD, Kecerahan Belanja, Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap PE c. Seluruh variabel Independen dalam penelitian ini secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap PE.	Efisien PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PE sebab adanya realisasi belanja terlalu besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD yang menyebabkan terjadinya kekurangan anggaran dan tidak dapat dialokasikan untuk investasi. Hal ini menunjukkan adanya inefisiensi, sehingga sebagian anggaran yang dialokasikan dapat mendorong PE.

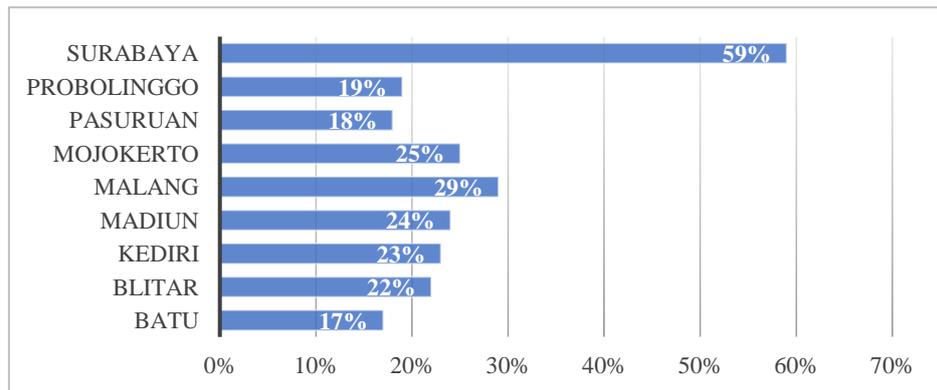
Sumber : Data diolah 2022

<sup>30</sup> Muhammad Azhari, Andria Zulfa dan Murtala, "The Role Of Good Governance In Economic Growth: Mediated By Regional Financial Performance And Capital Expenditure Allocation", *Ilomaj International Journal of Tax & Accounting (IJTC)*, Vol. 2, No. 3, Tahun 2021, 194-208, Hal. 89-92 (diakses tanggal 22 juni 2021), pukul 08:14

<sup>31</sup> Istia Nur Pradiatmi dan Hardiyanto Wibowo, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Pengaruh Kinerja Keuangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten /kota di Jawa Tengah, Vol.5 No. 2, Oktober 2015, Hal. 763-766

Rasio efisiensi PAD merupakan suatu gambaran keuangan yang menjelaskan tentang biaya yang dikeluarkan demi memperoleh pendapatan. Dengan mengeluarkan biaya yang optimal dan mampu memperoleh pemasukan yang banyak, maka akan terjadi keberhasilan program-program yang telah direncanakan oleh daerah, sehingga berdampak pada kesejahteraan daerah dan pertumbuhan ekonomi meningkat. Dengan demikian pemerintah daerah kembali dihadapkan dengan persoalan derajat desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi mencerminkan PAD yang dibandingkan dengan total PAD. Semakin rendah nilai derajat desentralisasi maka semakin tinggi tingkat kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung terealisasinya otonomi daerah.<sup>32</sup>

**Grafik 1.6**  
**Derajat Desentralisasi Perkotaan di Provinsi Jawa Timur**  
**Periode 2019-2021 Dalam Bentuk Persen**



Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022<sup>33</sup>

Berdasarkan data yang terdapat pada grafik 1.6 diatas maka dapat diketahui nilai Rasio Desentralisasi selama 3 tahun terakhir periode 2019-2022 perkotaan di Jawa Timur, terlihat bahwa nilai derajat desentralisasi tertinggi dimiliki oleh Kota Surabaya sedangkan nilai derajat desentralisasi terendah dimiliki oleh Kota Batu. Hal ini dapat terjadi karena realisasi PAD yang rendah dari rata-rata 3 tahun terakhir ditambah adanya kontraksi akibat

<sup>32</sup> *Ibid.*, Hal. 235

<sup>33</sup> Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2021*, <https://jatim.bps.go.id/>, (diakses pada Jumat 10 Juni 2022), Pukul 14.43 WIB

pandemi covid-19 sehingga derajat desentralisasi pengelolaan keuangan menjadi terhambat dan dalam laporannya menjadi lebih rendah dari rata-rata tahun sebelumnya. Rasio derajat desentralisasi berfungsi sebagai ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

**Tabel 1.6**  
**Perbedaan Hasil Penelitian Terhadap Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

<b>Peneliti (Tahun)</b>	<b>Variabel X : Independen Y: Dependen</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
Lintantia Fajar Apriesta dan Miyasto (2013) <sup>34</sup>	Derajat Desentralisasi (X1), Rasio Pajak Daerah (X2), Pertumbuhan Populasi (X3), Jumlah Tenaga Kerja (X4) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	a. Derajat Desentralisasi, Pertumbuhan Populasi, Jumlah Tenaga Kerja secara parsial berpengaruh terhadap PE. b. Pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap PE. c. Seluruh variabel independen dalam penelitian ini secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PE	Pengaruh negatif dan signifikan terhadap PE karena Hal ini dikarenakan meningkatnya pendapatan masyarakat yang menjadikan tingkat daya beli meningkat, sehingga meningkatkan penerimaan PAD maka semakin besar pula penerimaan daerah yang dapat dialokasikan pada sumber daya di sektor publik yang lebih luas lagi terutama pada investasi yang nantinya akan meningkatkan PE.
Rico Putra dan Surya Hidayat (2016) <sup>35</sup>	Derajat Desentralisasi (X1), Ketergantungan Keuangan (X2), Kemandirian	a. Seluruh variabel Independen dalam penelitian ini secara parsial tidak berpengaruh	Derajat desentralisasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PE sebab belum terkelolanya kinerja

<sup>34</sup> Lintangia Fajar Apriesta dan Miyasto, *Diponegoro Journal Of Economics*, Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus : Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah), Vol.2 No. 1, Oktober 2013, Hal. 9

<sup>35</sup> Rico Putra dan Surya Hidayat, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi

	Keuangan (X3), Efektivitas PAD (X4) Pertumbuhan Ekonomi (Y)	signifikan terhadap PE b. Seluruh variabel Independen dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PE	pengelolaan, pemungutan pajak, dan retribusi daerah dengan baik. Serta kurang teridentifikasinya potensi-potensi daerah yang berpeluang sebagai sumber-sumber penerimaan daerah yang baru.
--	---	--	--

Sumber : Data diolah 2022

Derajat desentralisasi memungkinkan daerah untuk dapat mengelola kemampuan keuangannya sendiri dalam rangka membiayai pembangunan di daerahnya tersebut. Pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Derajat desentralisasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat. Pengertian di atas mengisyaratkan bahwa desentralisasi memberikan ruang gerak yang lebih bagi pemerintah daerah untuk berimprovisasi dalam hal pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah serta kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan daerah, seperti pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang produktif (capital investment) di daerahnya. Secara teori, desentralisasi akan mendekatkan pemerintah kepada masyarakat sehingga dalam sistem pemerintahan yang desentralistik akan tercipta efisiensi dalam perekonomian, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>36</sup>

Fokus dari penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui fungsi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Jawa Timur dalam kurun waktu 2014 sampai 2021 yang

---

Provinsi Jambi, Vol. 3 No. 4, April-Juni 2016 ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online), Hal. 248-254

<sup>36</sup> Mohammad Khusaini. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. (Malang: BPFE Unibraw, 2006). Hal. 78

meliputi 9 Kota yang ada di Jawa Timur. Banyak faktor yg dapat memengaruhi proses penyusunan anggaran, sampai munculnya kendala-kendala yang dihadapi seperti: tidak stabilnya keuangan daerah, adanya kepentingan politik daerah, adanya kepentingan pribadi, adanya perilaku moral , dll. Berbagai kendala harus siap dihadapi oleh pemerintah daerah, dari kendala-kendala tersebut terdapat kendala yang dapat di analisis oleh pemerintah daerah yaitu kendala yang asalnya dari keuangan daerah sendiri, oleh sebab itu maka peneliti ingin mengambil variabel keuangan daerah, dimana kinerja keuangan perkotaan Provinsi Jawa Timur. Kinerja keuangan perkotaan dalam penelitian ini teliti menggunakan rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD, dan rasio derajat desentralisasi. Untuk pertumbuhan ekonomi peneliti menggunakan PDRB harga konstan periode 2014-2021.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Rasio kemandirian keuangan daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021 mengalami nilai yang berfluktuatif dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi nilai kemandirian keuangan maka semakin optimal kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021 mengalami nilai yang berfluktuatif dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi nilai ketergantungan keuangan maka semakin daerah bergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun.
3. Rasio efektivitas PAD daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021 mengalami nilai yang berfluktuatif dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi nilai efektivitas PAD maka kinerja pemerintah daerah dikatakan optimal dalam mengelola PAD yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat.

4. Rasio efisiensi PAD daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021 mengalami nilai yang berfluktuatif dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi nilai efisiensi PAD maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD karena besarnya nilai belanja daerah yang harus dikeluarkan yang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun.
5. Rasio derajat desentralisasi daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021 mengalami nilai yang berfluktuatif dan hal tersebut berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena semakin tinggi nilai derajat desentralisasi maka semakin rendah kinerja pemerintah daerah dalam mengelola PAD karena memicu instabilisasi ekonomi yang berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun.
6. Kinerja Keuangan yang diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, efisiensi PAD, dan derajat desentralisasi pada daerah perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021 mengalami nilai yang berflutiatif, yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di paparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah dari “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2021” sebagai berikut :

1. Apakah rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan provinsi jawa timur periode 2014-2021?
2. Apakah rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan provinsi jawa timur periode 2014-2021?

3. Apakah rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan provinsi jawa timur periode 2014-2021?
4. Apakah rasio efisiensi PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan provinsi jawa timur periode 2014-2021?
5. Apakah rasio derajat desentralisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan provinsi jawa timur periode 2014-2021?

#### **D. Tujuan Penelitian**

adapun tujuan yang ingin di capai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji dan menjelaskan pengaruh rasio kemandirian keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021
2. Menguji dan menjelaskan pengaruh rasio ketergantungan keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021
3. Menguji dan menjelaskan pengaruh rasio efektivitas PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021
4. Menguji dan menjelaskan pengaruh rasio efisiensi PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021
5. Menguji dan menjelaskan pengaruh rasio derajat desentralisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021
6. Menguji dan menjelaskan pengaruh Kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, efisiensi PAD, dan derajat desentralisasi secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan konsep teori tentang “Pengaruh Kinerja Keuangan (Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan, Efektivitas PAD, Efisiensi PAD, Derajat Desentralisasi) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Provinsi Jawa Timur”.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah Kota Provinsi Jawa Timur**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Sehingga dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan pengelolaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### **b. Bagi Peneliti**

Dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan dalam periode yang ditentukan.

#### **c. Bagi Akademik**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Islam Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Terutama untuk memberikan informasi dan tambahan yang mungkin bermanfaat bagi fakultas ekonomi dan bisnis islam mengenai kinerja keuangan.

#### **d. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Hasil dari penelitian ini Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam peneliti selanjutnya yang ada keterkaitan dengan kinerja keuangan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian, maka penulis mengambil ruang lingkup dalam pembahasan yang dibahas pada penelitian

ini. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pokok pembahasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas terkait masalah yang sudah dijabarkan dalam rumusan masalah. Hal ini dilakukan agar tidak keluar dari pembahasan yang di bahas. Sebab demikian diperlukan ruang lingkup dalam penelitian. Penulis membatasi ruang lingkup pada penelitian ini fokus pada Enam variabel penelitian yang terdiri dari :

1. Variabel Bebas (X) terdiri dari empat variabel yaitu Rasio Kemandirian Keuangan ( $X_1$ ), Rasio Ketergantungan Keuangan ( $X_2$ ), Rasio Efektivitas PAD ( $X_3$ ), Rasio Efisiensi PAD ( $X_4$ ), Rasio Derajat Desentralisasi ( $X_5$ )
2. Variabel Terikat (Y) terdiri dari satu variabel yaitu Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_1$ )
3. Populasi dalam penelitian ini diambil dari daerah di Provinsi Jawa Timur. Sampel pada penelitian ini adalah 9 kota di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2021.

## **G. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam sebuah pemahaman ataupun perbedaan penafsiran yang berhubungan dengan istilah islitah pada judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan mengenai variabel-variabel yang diguunakan dalamn penelitian ini.

### **1. Definisi Konseptual**

#### **a. Pertumbuhan Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai suatu barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.<sup>37</sup> Berikut rumus dalam menghitung pertumbuhan ekonomi:

---

<sup>37</sup> Badan Pusat Statistik, *Pedoman Praktis Penghitungan PDRB/Kota*, (Jakarta: BPS-Statistik Indonesia, 2008), Hal. 17

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

PDRB<sub>1</sub> : PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada suatu tahun

PDRB<sub>0</sub> : PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada suatu tahun sebelumnya

b. Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan mencerminkan tinggi rendahnya keikutsertaan masyarakat terhadap pembangunan di daerah aslinya. Semakin tinggi tingkat keikutsertaan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan unsur utama Pendapatan Asli Daerah, dengan demikian dapat diartikan semakin tinggi kemandirian keuangan maka tinggi pula tingkat kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan tujuan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula.<sup>38</sup> Berikut rumus dalam menghitung kemandirian keuangan :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

c. Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio ketergantungan keuangan menggambarkan perbandingan antara dana bantuan dari pemerintah dengan total pendapatan asli daerah. Semakin tinggi angka perbandingan antara dana bantuan dengan total pendapatan daerah maka semakin tinggi pula nilai ketergantungan keuangan pengelolaan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.<sup>39</sup> Berikut rumus dalam menghitung ketergantungan keuangan :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

---

<sup>38</sup> Joko Widodo, *Good Governance*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), Hal. 262

<sup>39</sup> *Ibid.*, Hal. 235

d. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD mencerminkan perbandingan antara tingkat kemampuan pemerintah daerah terhadap terealisasi Pendapatan Asli Daerah dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Dimana semakin tinggi nilai efektifitas, maka semakin efektif kinerja keuangan dalam mengelola keuangannya, begitu pula sebaliknya.<sup>40</sup> Berikut rumus dalam menghitung efektivitas PAD :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi PAD mencerminkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan atau pemungutan PAD dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hal ini berarti semakin tinggi angka efisiensi PAD maka, pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah dikatakan tidak optimal begitu juga sebaliknya apabila nilai efisiensi PAD rendah maka dapat dikatakan optimalnya kinerja keuangan.<sup>41</sup> Berikut rumus dalam menghitung efisiensi PAD :

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

f. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi mencerminkan Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah. semakin tinggi nilai derajat desentralisasi maka semakin rendah tingkat kemampuan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung terealisasinya otonomi daerah karena disebabkan

---

<sup>40</sup> Abdul Halim, *Manajemen Keuangan daerah*, (Yogyakarta : Penerbit UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), Hal. 234

<sup>41</sup> *Ibid.*, Hal. 234

terjadinya instabilisasi ekonomi.<sup>42</sup> Berikut rumus dalam menghitung derajat desentralisasi :

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## 2. Definisi Operasional

Setelah menjabarkan definisi secara konseptual diatas, maka secara operasionalnya dalam peneitian yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2021”. hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari lima faktor yang terdiri dari kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, efisiensi PAD, dan derajat desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi perkotaan di Provinsi Jawa Timur periode 2014-2021.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan dalam setiap babnya. Hal tersebut bertujuan supaya penulisan menjadi lebih terarah dalam memaparkan pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut meliputi :

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan Skripsi.

### **BAB II           KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang diperlukan dalam memaparkan variabel yang diteliti. Dalam bab ini berisi tentang teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, Hal. 235

kinerja keuangan, faktor faktor yang memengaruhi kinerja keuangan, kemandirian keuangan, ketergantungan keuangan, efektivitas PAD, efisiensi PAD, derajat desentralisasi, hubungan kemandirian keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan ketergantungan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan efektivitas PAD dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan efisiensi PAD dengan pertumbuhan ekonomi, hubungan derajat desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian, mapping variabel dan operasional

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling, dan sampel penelitian, sumber data, variabel, skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data .

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, analisis data pengajuan hipotesis

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pembahasan mencakup Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2021, Hasil Kerangka konseptual dan Implikasi penelitian.

### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bagian akhir dari penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumentasi, surat-surat, riwayat hidup peneliti dan berita acara skripsi.